

Salim Belum Juga Ditahan

● Korupsi APBD Rembang

SEMARANG - Bupati Rembang Mochamad Salim belum juga ditahan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah mengaku belum bisa memproses tersangka dugaan korupsi penyertaan modal itu.

Hal itu dikarenakan berkas penyidikan yang disusun Polda tidak lengkap, sehingga oleh kejaksaan terpaksa dikembalikan. Berkas sudah dikirimkan ke kepolisian sejak 27 Agustus 2013 lalu.

Berkas penyidikan itu menyangkut dugaan korupsi penyertaan modal APBD Rembang ke PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ).

"Berkas dikembalikan disertai dengan petunjuk kelengkapan.

masih ada syarat formal maupun material yang harus dilengkapi," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Eko Suwarni, Kamis (5/9).

Menanggapi itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Kombes Mas Guntur Laope mengakui berkas penyidikan masih P19 atau perlu dilengkapi. Saat ini pihaknya tengah menunggu jawaban dari surat permohonan penahanan atas tersangka.

Surat sudah dikirimkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Hasil rekomendasi dari Bareskrim itu nantinya akan naik lagi ke Presiden, apakah disetujui atau tidak.

"Secepatnya kami akan kirimkan lagi dengan lengkap sesuai petunjuk jaksa," katanya.

Penyertaan modal yang menyeret Salim menjadi tersangka itu dilakukan tahun 2006-2007. PT RBSJ merupakan *holding company* milik Pemerintah Kabupaten Rembang yang mengelola beberapa unit usaha. Di antaranya unit industri, peternakan, perkebunan, perikanan dan pariwisata, termasuk pembukaan unit SPBU. Tahun 2006 dan 2007 APBD Rembang menggelontor modal ke PT RBSJ sebesar Rp 35 miliar.

Sempat Molor

Tahun 2008 melalui laporan hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan

adanya penyertaan modal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 5,542 miliar. Lalu pada 2010, Polda Jawa Tengah menyidik kasus tersebut dan menetapkan Mochamad Salim beserta mantan direktur PT RBSJ, Siswadi sebagai tersangka.

Kasus ini sempat molor penanganannya. Penyidik Polda berdalih menunggu audit penghitungan kerugian negara dari BPK RI. Akhirnya pada Februari 2013 lalu, BPK mengeluarkan audit kerugian negara yang menyatakan kerugian APBD Rembang Rp 4,19 miliar dalam penyertaan modal tersebut.

Kerugian itu meliputi pembelian tanah untuk SPBU sebesar Rp 1,8 miliar atas nama Siswadi. Sementara sisanya merupakan kerugian dari pengelolaan SPBU yang tercatat atas nama perusahaan lain. (H89-90)